
Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Realitas di Lapangan

Oktavera Rachmadita ^{1, a *}, Mahpudin ^{2, b}

¹ Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia ² Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

^a oktaarachma29@gmail.com; ^b mahpudin893@gmail.com * Corresponding Author

Receipt: Artikel dikirim; Revision: Artikel diputuskan revisi; Accepted: Artikel diputuskan diterima @The Author(s) 2024

Abstract:

The Merdeka Curriculum is an educational reform policy aimed at providing learning flexibility and fostering the holistic development of students' competencies and character. This study aims to examine the implementation of the Merdeka Curriculum in primary schools, particularly focusing on the role of teachers, differentiated learning, and challenges encountered during its implementation. This research employed a qualitative approach using a literature study method by analyzing relevant scholarly articles and national accredited journals. The findings indicate that the Merdeka Curriculum emphasizes essential competencies, project-based learning, and the strengthening of the Pancasila Student Profile. The success of its implementation is highly dependent on teachers' readiness as learning designers, including pedagogical, professional, and digital competencies. However, several challenges remain, such as difficulties in developing teaching modules, high administrative workloads, and infrastructure disparities, especially in underdeveloped, frontier, and remote (3T) areas. Despite these challenges, differentiated and project-based learning has shown positive impacts on students' learning motivation and creativity. Therefore, continuous teacher capacity building and systemic support are essential to ensure the optimal implementation of the Merdeka Curriculum across all educational units.

Keywords: Merdeka Curriculum, elementary education, policy implementation, differentiated learning, character education

Abstrak:

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pembaruan pendidikan yang bertujuan memberikan fleksibilitas pembelajaran serta mendorong pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, khususnya terkait peran guru, pembelajaran berdiferensiasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis terhadap berbagai artikel ilmiah dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka berorientasi pada penguatan kompetensi esensial, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan guru sebagai perancang pembelajaran, baik dari aspek pedagogis, profesional, maupun digital. Namun, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengembangan modul ajar, beban administrasi guru, serta kesenjangan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meskipun demikian, pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek menunjukkan dampak positif terhadap motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru dan dukungan sistem yang berkelanjutan agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara optimal di seluruh satuan pendidikan.

Kata kunci : Kurikulum Merdeka, sekolah dasar, implementasi kebijakan, pembelajaran berdiferensiasi, profil pelajar Pancasila

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan instrumen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Melalui kurikulum, arah pengembangan kompetensi, karakter, dan nilai-nilai peserta didik dirumuskan secara sistematis, sehingga perubahan kurikulum tidak dapat dipandang semata sebagai penyesuaian administratif, melainkan sebagai respons terhadap dinamika social, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan global yang semakin kompleks (Rahmadani et al., 2024). Dalam konteks tersebut, sistem pendidikan Indonesia dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sebagai bekal menghadapi tantangan abad ke-21.

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada sekolah dan guru dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Penekanan pada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila menunjukkan upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual (Veronica & Hayati, 2024).

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka merepresentasikan pergeseran paradigma pembelajaran dari pendekatan yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam paradigma ini, guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator yang mendampingi dan mengarahkan proses belajar siswa. Namun, menurut Nuryanti et al. (2023), implementasi kurikulum ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait pemahaman guru terhadap prinsip pembelajaran berdiferensiasi serta kemampuan dalam mengembangkan modul ajar mandiri sesuai kebutuhan peserta didik.

Sumarsih et al. (2022) mengungkapkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai daerah menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan antar sekolah. Sekolah penggerak umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik karena memperoleh pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, sementara sekolah nonpenggerak masih mengalami keterbatasan dalam memahami landasan konseptual dan teknis implementasi kurikulum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem dan kesiapan sumber daya di tingkat satuan pendidikan.

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum, tetapi juga oleh kesiapan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan di sekolah. Hasil kajian Mardiana & Emmiyati (2024)

menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah dasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, dan sumber pustaka relevan yang membahas implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Data dikumpulkan melalui penelusuran database jurnal ilmiah dan analisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep, temuan penelitian, serta permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, khususnya terkait peran guru, pembelajaran berdiferensiasi, dan konteks satuan pendidikan. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai upaya pembaruan pembelajaran yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan kreativitas dan keaktifan peserta didik. Kurikulum ini menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran serta mendorong terwujudnya proses belajar yang lebih fleksibel dan kontekstual, sebagaimana dijelaskan oleh Hasmiati et al. (2023). Secara filosofis, Kurikulum Merdeka berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip pendidikan humanistik yang menekankan pengembangan potensi peserta didik secara holistik.

Berdasarkan hasil kajian implementasi, Kurikulum Merdeka berorientasi pada penguatan kompetensi esensial, fleksibilitas perancangan pembelajaran, serta penguatan karakter melalui proyek Profil Pelajar Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan sosial peserta didik, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian Mardiana & Emmiyati (2024).

Dari sisi kebijakan pendidikan, Kurikulum Merdeka mencerminkan upaya penyesuaian sistem pendidikan terhadap kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan yang beragam. Namun demikian, fleksibilitas yang diberikan kepada sekolah dan guru menuntut kemampuan profesional yang memadai dalam menafsirkan dan menerapkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran. Tanpa kesiapan tersebut, implementasi kurikulum berpotensi berjalan tidak optimal (Alimuddin, 2023).

Veronica & Hayati (2024) menekankan bahwa salah satu karakteristik utama Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas peran guru sebagai perancang pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu menganalisis kebutuhan belajar peserta didik, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai, serta mengembangkan modul ajar yang relevan dengan kondisi kelas. Peran ini menjadikan guru sebagai aktor kunci dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.

Namun, dalam praktiknya, banyak guru sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan peran tersebut. Guru mengalami kesulitan dalam

pengembangan modul ajar mandiri akibat keterbatasan waktu, tingginya beban administrasi, serta kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan, sehingga pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi belum berjalan secara optimal (Nuryanti et al., 2023).

Kendala yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka tersebut diperkuat oleh temuan Aulia et al. (2025) yang menegaskan bahwa kesiapan pedagogis, profesional, sosial, dan digital guru merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Guru yang memiliki kesiapan tersebut cenderung lebih adaptif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan partisipatif. Namun, tingkat kesiapan guru tersebut tidak terlepas dari konteks dan kondisi satuan pendidikan, sehingga pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses sumber daya, tantangan implementasi Kurikulum Merdeka menjadi semakin kompleks.

Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka juga semakin terasa di sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, serta minimnya pendampingan menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pembelajaran inovatif dan berbasis proyek di wilayah tersebut (Suryaningrum, 2023).

Hasil kajian pada sekolah penggerak menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur serta dukungan kelembagaan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam konteks ini, menurut Sumarsih et al. (2022), keberadaan sarana prasarana pembelajaran yang memadai serta dukungan kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan pelaksanaan kurikulum secara efektif dan berkelanjutan. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama yang memastikan tersedianya lingkungan belajar yang kondusif serta mendorong guru untuk mengembangkan pembelajaran inovatif sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pembelajaran kolaboratif juga mampu meningkatkan kerja sama dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran (Anwar et al., 2025; Farhurohman et al., 2024).

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka belum merata di seluruh satuan pendidikan. Di beberapa sekolah, kurikulum ini masih dipahami sebatas pemenuhan administrasi pembelajaran, sehingga esensi pembelajaran bermakna dan berpusat pada peserta didik belum sepenuhnya terwujud (Rahmadani et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kebijakan dan kajian literatur, Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pembaruan pendidikan yang berorientasi pada fleksibilitas pembelajaran, penguatan kompetensi esensial, serta pengembangan karakter peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek. Implementasi kebijakan ini di sekolah dasar menunjukkan upaya pergeseran paradigma pembelajaran menuju pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Namun, realitas di lapangan

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kesiapan guru sebagai perancang pembelajaran, baik dari aspek pedagogis, profesional, maupun digital.

Meskipun implementasi Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, kreativitas, dan partisipasi peserta didik, pelaksanaannya belum berjalan secara merata di seluruh satuan pendidikan. Berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan pengembangan modul ajar, beban administrasi guru, serta kesenjangan infrastruktur dan pendampingan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, pendampingan yang berkelanjutan, serta dukungan sistem yang kontekstual agar kebijakan Kurikulum Merdeka dapat terimplementasi secara optimal dan berkelanjutan di sekolah dasar.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 4(02), 67–75. <https://doi.org/10.46772/kontekstual.v4i02.995>
- Anwar, C., Munir, M. S., Muharram, M. S., & Rozaq, M. M. N. (2025). *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar*. 4(4), 213–229.
- Aulia, R., Adelia, N. S., Castri, Y., & Kurnia, R. (2025). Kesiapan Guru Sekolah Dasar terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1827–1833. <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971>
- Farhurohman, O., Arum, A. E. M., Nafisah, U., & Mira, I. (2024). *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. 17(2), 95–105.
- Hasmiati, Fawzani, N., & Muhlis, W. (2023). Implementasi kurikulum merdeka untuk mengembangkan kreativitas peserta didik di sekolah dasar. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Mardiana, & Emmiyati. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran: Evaluasi dan Pembaruan*. 10(2), 121–127.
- Nuryanti, N. E., Mulyana, E. H., & Loita, A. (2023). Analisis Kesulitan Guru dalam Pengembangan Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka. *Jurnal Paud Agapedia*, 7(2), 176–183. <https://doi.org/10.17509/jpa.v7i2.63929>
- Rahmadani, P. D., Asbari, M., Jati, D. H., & Pratama, E. A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Meningkatkan Sistem Pendidikan Indonesia? *JISMA: Journal of Information Systems and Management*, 3(2), 1–4.
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). *Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar*. 6(5), 8248–8258.
- Suryaningrum, S. (2023). Penguatan Kapasitas Guru Pada Implementasi Kurikulum Merdeka Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). *Wahana Dedikasi*, 6(1), 165–172.
- Veronica, H., & Hayati. (2024). *Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada Siswa-Siswi Sekolah Dasar*. 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.30595/jrpd.v5i1.16101>